

PERAN FORUM KOMUNIKASI PEMUDA PALARAN SEBAGAI MEDIA ADVOKASI MASALAH INFRASTRUKTUR EKONOMI DI KECAMATAN PALARAN

Dicky Erlangga Ramadhan¹, A. Ismail Lukman²

Abstrak

Ketimpangan infrastruktur ekonomi di Indonesia berdampak pada akses mobilitas, pendidikan, layanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi, terutama di wilayah pinggiran seperti Kecamatan Palaran. Forum Komunikasi Pemuda Palaran (FORKOM PEMERAN) hadir sebagai media advokasi yang digerakkan oleh pemuda untuk merespons permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi advokasi yang dilakukan FORKOM PEMERAN serta dampaknya terhadap perbaikan jalan dan partisipasi warga. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori Gerakan Sosial Baru (New Social Movement). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan meliputi pemetaan masalah, kampanye media sosial, aksi lapangan, dan audiensi dengan pemangku kebijakan. Upaya ini mendorong respons positif dari pemerintah serta membangun kesadaran kolektif dan kepercayaan warga terhadap proses advokasi. FORKOM PEMERAN membuktikan bahwa pemuda dapat menjadi aktor penting dalam gerakan sosial berbasis komunitas dan media digital.

Kata Kunci: Advokasi, pemuda, infrastruktur ekonomi, gerakan sosial baru

Pendahuluan

Advokasi memiliki peran strategis dalam mendukung proses pembangunan masyarakat di Indonesia, terutama dalam memperjuangkan kepentingan publik dan mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Widjajanto (2017) menegaskan bahwa masyarakat sipil sebagai salah satu pilar utama demokrasi berperan penting dalam menggerakkan proses politik menuju partisipasi yang lebih luas. Dalam konteks pembangunan nasional, peran advokasi yang dijalankan oleh masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (NGO) telah terbukti membawa dampak signifikan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, hak tanah adat, dan infrastruktur ekonomi (Wardani, 2024).

Sektor infrastruktur ekonomi, khususnya ketersediaan jalan yang layak, menjadi elemen penting dalam mempercepat konektivitas wilayah dan pemerataan pembangunan. Awainah et al. (2024) menyatakan bahwa infrastruktur jalan tidak hanya memfasilitasi distribusi barang dan jasa, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di daerah-daerah tertinggal. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya melalui peningkatan alokasi anggaran infrastruktur yang dikutip dalam *Buku Informasi APBN Tahun 2024* yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, alokasi anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 yang pada tahun 2024 mencapai Rp 422,7 triliun, naik sekitar 7,83% dari tahun sebelumnya (Kemenkeu, 2024).

Namun demikian, realitas di lapangan masih menunjukkan banyak tantangan. Bappenas (2020) mencatat bahwa masih banyak daerah yang menghadapi permasalahan infrastruktur dasar, terutama di wilayah pinggiran dan perdesaan. Salah satu contohnya terjadi di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur yang dikutip dalam pemberitaan yang dilansir Tribun Kaltim (2024), dimana masyarakat Palaran masih sering menghadapi kondisi jalan yang rusak dan sering tergenang banjir, seperti di Jalan Trikora. Kondisi ini tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi,

¹Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.
Email: dickyerlanggaramadhan24@gmail.com

²Dosen Pembimbing, Dosen Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

tetapi juga membatasi akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Padahal, secara demografis, Kecamatan Palaran memiliki potensi besar untuk tumbuh sebagai pusat produktivitas ekonomi. BPS (2023) mencatat bahwa dari total populasi sebanyak 66.912 jiwa, lebih dari 60% penduduk berada dalam usia produktif. Potensi ini, sebagaimana diungkapkan oleh Todaro & Smith (2020), merupakan aset penting dalam pembangunan ekonomi lokal apabila didukung dengan infrastruktur dan kebijakan yang memadai.

Dalam merespons persoalan tersebut, Forum Komunikasi Pemuda Palaran (FORKOM PEMERAN) hadir sebagai aktor lokal yang menjalankan peran advokasi terhadap perbaikan infrastruktur jalan. FORKOM PEMERAN melakukan berbagai strategi seperti audiensi dengan pemerintah, kampanye media sosial, dan survei lapangan untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Halimawan (2020) yang menyatakan bahwa advokasi oleh komunitas bertujuan untuk mempengaruhi pemikiran publik dan mengubah kebijakan menuju arah yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Meskipun menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan sumber daya dan resistensi dari birokrasi, FORKOM PEMERAN menunjukkan bahwa strategi advokasi yang tepat mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong perubahan sosial. Syofii (2020) menekankan bahwa keberhasilan advokasi sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam membangun komunikasi yang efektif, memobilisasi dukungan, serta merancang strategi advokasi yang terstruktur. Peran pemuda seperti yang dilakukan oleh FORKOM PEMERAN juga mempertegas pentingnya literasi advokasi di kalangan generasi muda (Kartika, 2023).

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran FORKOM PEMERAN sebagai media advokasi dalam mengatasi masalah infrastruktur ekonomi di Kecamatan Palaran. Fokus kajian ini mencakup strategi advokasi yang diterapkan, hambatan yang dihadapi, serta dampak nyata yang dihasilkan terhadap perbaikan infrastruktur jalan di wilayah tersebut. Mengingat minimnya kajian yang menyoroti kontribusi organisasi kepemudaan dalam advokasi pembangunan infrastruktur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat peran masyarakat sipil dalam pembangunan sosial berkelanjutan.

Kerangka Dasar Teori

Teori Gerakan Sosial Baru (New Social Movement)

Gerakan sosial baru memiliki ciri-ciri yang membedakannya dari gerakan sosial lama. Dalam konteks ini, Alberto Melucci (1989) dikutip dalam Wiranata, I. M. A. (2022) menjelaskan empat aspek utama yang menjadi ciri khas gerakan sosial baru, yaitu:

1. Identitas Kolektif

Fokus pada pembentukan identitas bersama melalui interaksi, komunikasi, dan solidaritas menekankan aspek budaya dan makna bersama, bukan sekadar perubahan institusional. Hal ini mencerminkan bagaimana gerakan sosial baru menekankan aspek budaya dan makna bersama.

2. Berorientasi pada Nilai dan Simbol

Memperjuangkan nilai, gaya hidup, dan simbol, serta menentang dominasi budaya dan ekonomi yang mapan. Mereka sering menentang pola-pola dominasi budaya dan ekonomi, serta mempromosikan bentuk-bentuk baru ekspresi dan hubungan sosial.

3. Desentralisasi dan Jaringan

Tidak hierarkis; bergerak dalam jaringan fleksibel yang mendukung kolaborasi demokratis antar kelompok. Gerakan sosial baru lebih cenderung bersifat desentralisasi, mereka beroperasi

dalam jaringan yang fleksibel dan horizontal, yang memungkinkan kolaborasi antar kelompok secara lebih inklusif dan demokratis.

4. Keterhubungan Ruang Privat dan Publik

Mengangkat isu pribadi seperti gender dan lingkungan sebagai bagian dari isu politik yang lebih luas. Gerakan social baru memperjuangkan keterhubungan antara ruang privat dan ruang publik, menunjukkan bahwa masalah pribadi sering kali merupakan masalah politik.

Advokasi

Advokasi di Indonesia memainkan peran penting dalam mendorong perubahan sosial dan kebijakan publik, terutama pasca-Reformasi 1998. Fokusnya mencakup pemberantasan korupsi, perlindungan HAM, dan pembelaan kelompok marginal (Sholikin, 2024). Dalam konteks negara berkembang, advokasi juga mencakup pengorganisasian masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak hukum dan sosial, meski sering menghadapi represi negara dan keterbatasan sumber daya. Tarrow (2017) menyatakan bahwa advokasi adalah upaya terorganisir untuk memengaruhi kebijakan publik, baik melalui jalur formal maupun informal, dan bersifat strategis dalam menciptakan perubahan sosial. Sementara itu, Coffman & Beer (dalam Cahyaningrum, 2020) menekankan pentingnya strategi advokasi berbasis teori perubahan, yang tidak hanya diterapkan di tingkat pemerintah, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh komunitas dalam menentukan pendekatan program. Namun, konsep ini dapat juga dipakai untuk menjelaskan langkah startegis komunitas menentukan program dan pendekatan. Coffman menulis strategi advokasi sebagai langkah-langkah untuk membuat suatu perubahan sosial.

Forum Komunikasi

Menurut Salahuddin, S. P (2024), forum komunikasi berfungsi sebagai wadah untuk pertukaran informasi dan ide antar berbagai pihak, dengan tujuan mencapai pemahaman bersama atau mencari solusi atas masalah yang ada. Seringkali, forum ini digunakan untuk menyatukan beragam pandangan dan membangun komunikasi yang produktif antara individu atau kelompok dengan kepentingan yang berbeda. Forum komunikasi pemuda berfungsi sebagai ruang untuk diskusi dan pertukaran informasi antar pemuda, guna menciptakan komunikasi yang positif dan membangun (baik dari segi sikap, pendekatan, maupun tindakan yang mendukung pembangunan, perbaikan, dan pencarian solusi). Forum ini juga memberi kesempatan bagi pemuda untuk menyampaikan ide, pendapat, dan gagasan kepada pihak yang berwenang.

Infrastruktur Ekonomi

Infrastruktur Ekonomi merupakan salah satu komponen utama yang mendukung keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Menurut The World Bank (1994) yang dikutip oleh Brilyawan dan Santosa (2021) infrastruktur ekonomi ini mencakup berbagai sektor seperti transportasi, energi, komunikasi, air bersih, dan sanitasi, yang kesemuanya memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi ekonomi serta mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat. Dalam hal pengelolaan jalan, Indonesia mengatur hal ini melalui Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004, yang mengklasifikasikan jalan menjadi tiga jenis berdasarkan kewenangannya:

1. Jalan Nasional, yang dikelola oleh pemerintah pusat, menghubungkan antar provinsi, pelabuhan utama, bandara, serta kawasan strategis nasional.
2. Jalan Provinsi, yang dikelola oleh pemerintah provinsi, berfungsi menghubungkan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi.
3. Jalan Kabupaten/Kota, yang dikelola oleh pemerintah daerah, berfungsi meningkatkan konektivitas di tingkat lokal.

Pemuda

Pemuda memainkan peran penting sebagai agen utama dalam perubahan sosial yang terjadi di tingkat global, termasuk di Indonesia. Sebagai kelompok yang beragam, pemuda berada pada fase transisi dari masa kanak-kanak ke kedewasaan, yakni pada usia 16 hingga 30 tahun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Sebagai penggerak utama pembangunan pemuda perlu diberikan ruang serta bimbingan untuk mengoptimalkan potensi mereka. Widhyharto dan Sutopo (2014) dikutip dalam Febriani, F., Sari, D. R., & Tandi Bua, A. N. (2020) menyatakan bahwa peran generasi muda terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, di masa depan generasi muda diharapkan dapat melanjutkan pembangunan bangsa dengan semangat idealisme, patriotisme, dan kreativitas dalam menghadapi tantangan global.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam strategi advokasi yang dijalankan oleh Forum Komunikasi Pemuda Palaran (FORKOM PEMERAN) dalam merespons permasalahan infrastruktur ekonomi, khususnya jalan rusak di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda. Subjek penelitian terdiri atas tiga kategori informan, yaitu: informan utama (Ketua FORKOM PEMERAN) yang memahami visi, misi, serta strategi organisasi; informan kunci (anggota inti) yang terlibat langsung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan advokasi; dan informan tambahan, seperti masyarakat terdampak serta Camat Palaran sebagai representasi pemerintah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta dokumentasi berupa foto kegiatan dan unggahan media sosial. Data primer diperoleh secara langsung dari interaksi dengan para informan, sementara data sekunder mencakup laporan organisasi, data statistik, kebijakan pemerintah, dan artikel media. Fokus penelitian terletak pada bentuk strategi advokasi yang dilakukan FORKOM PEMERAN, serta dampaknya terhadap perbaikan infrastruktur dan peningkatan partisipasi warga. Teknik analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interaktif dan berkesinambungan sepanjang proses penelitian berlangsung.

Hasil Penelitian

Strategi Advokasi FORKOM PEMERAN Dalam Penyelesaian Permasalahan Infrastruktur Jalan

Strategi advokasi merupakan serangkaian pendekatan sistematis yang dirancang untuk memengaruhi kebijakan publik, keputusan pemerintah, dan opini masyarakat dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan sosial. Dalam konteks persoalan infrastruktur jalan di Palaran, strategi advokasi dilakukan secara berlapis dan terencana, mulai dari identifikasi masalah, penggalangan dukungan, hingga intervensi langsung ke pihak pengambil keputusan. Penelitian ini mengidentifikasi empat strategi utama dalam proses advokasi:

1. Identifikasi dan Pemetaan Masalah Infrastruktur Jalan

Identifikasi dan pemetaan masalah merupakan langkah awal penting dalam strategi advokasi FORKOM PEMERAN untuk mendapatkan gambaran nyata kondisi masyarakat di Palaran sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Fokus identifikasi dan pemetaan masalah dalam penelitian ini ada pada tiga lokasi jalan rusak: Jalan di Kelurahan Handil Bakti, Jalan Penghijauan di Kelurahan Bukuan, dan Jalan Ampera-Trikora di Kelurahan Rawa Makmur, yang kerusakannya berdampak pada keselamatan, mobilitas, dan aktivitas sosial ekonomi warga.

Data dikumpulkan melalui observasi langsung, dokumentasi visual, serta aduan warga via media sosial. Strategi ini menyoroti dampak kerusakan terhadap keselamatan dan aktivitas sosial ekonomi warga, khususnya di titik rawan seperti Jalan Ampera-Trikora. Proses ini tidak hanya memetakan kerusakan fisik, tetapi juga menyoroti dampak sosial seperti keselamatan, ekonomi rumah tangga, serta akses terhadap pendidikan dan layanan publik. Latar belakang dari proses

identifikasi dan pemetaan masalah ini dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu sosial ekonomi dan keselamatan publik.

2. *Kampanye Media Sosial (Instagram dan Blog)*

FORKOM PEMERAN yang memanfaatkan platform seperti Instagram dan Blog untuk menyebarkan informasi, membangun kesadaran kolektif, dan menekan pemerintah agar merespons kondisi jalan rusak di Kecamatan Palaran. FORKOM PEMERAN tidak hanya memiliki akun Instagram sendiri, tetapi juga menjalin kerja sama dengan akun-akun media sosial lokal seperti @infopalaran dan @palaranku untuk memperluas jangkauan informasi kepada pengguna media sosial. Mereka juga bekerja sama dengan blog seperti *adakah.id* dan *TribunKaltim.co* untuk menyampaikan narasi advokasi secara lebih rinci. Strategi digital ini terbukti efektif dalam membangun kesadaran publik dan mendorong tekanan terhadap pemangku kebijakan.

Fokus utama kampanye media sosial ini adalah dokumentasi visual dari titik-titik jalan yang dianggap berbahaya, seperti Jalan Ampera–Trikora, Jalan Penghijauan Bukuan, dan Jalan di Kelurahan Handil Bakti. Foto dan video jalan berlubang, tergenang, hingga minim penerangan disusun dalam narasi yang mengundang empati publik. FORKOM PEMERAN tidak hanya fokus pada eksposur, tapi juga membangun kredibilitas melalui media yang menyajikan informasi lengkap dan terstruktur. Blog menjadi kanal efektif untuk menyebarkan narasi advokasi ke berbagai kalangan, dari warga lokal hingga publik luas. Dengan strategi digital seperti ini, FORKOM PEMERAN mampu bersikap proaktif dalam membangun narasi publik yang kuat dan berkelanjutan, bukan hanya merespons isu sesaat.

3. *Aksi Lapangan dan Mobilisasi Dukungan Publik*

Aksi lapangan dilakukan FORKOM PEMERAN dengan warga setempat sebagai bentuk protes kreatif terhadap lambannya respons pemerintah. Selain sebagai sinyal lambannya kinerja dari pemerintah, pohon yang ditanam juga menjadi simbol keresahan warga Jalan Penghijauan Kelurahan Bukuan. Tidak hanya aksi penanaman pohon pisang, FORKOM PEMERAN juga menggalang dukungan publik dengan memobilisasi relawan dan masyarakat untuk melakukan aksi penandaan jalan rusak yang berada di Kecamatan Palaran.

Aliansi Masyarakat, Relawan, dan FORKOM PEMERAN melakukan penandaan terhadap jalan menggunakan pilok pada setiap lubang di jalan. melalui aksi lapangan seperti penanaman pohon pisang di jalan rusak, penandaan jalan, dan pemasangan tulisan sindiran yang dikombinasikan dengan mobilisasi dukungan publik, FORKOM PEMERAN berhasil menciptakan atensi dan tekanan sosial yang memperkuat daya tawar mereka dalam mendorong pemerintah untuk segera merespons persoalan infrastruktur yang ada, aksi ini memperkuat tekanan sosial dan keterlibatan warga yang turut berpartisipasi dan melaporkan kondisi jalan sebagai bagian dari gerakan kolektif.

4. *Audiensi dengan Pemangku Kepentingan*

Strategi ditutup dengan FORKOM PEMERAN melanjutkan strategi advokasinya dengan melakukan audiensi langsung kepada pemangku kepentingan terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan penanggung jawab teknis pemerintahan terkait perbaikan jalan. FORKOM PEMERAN tidak serta merta hanya beraudiens tetapi juga membawa data dan bukti kondisi jalan di Palaran dan menekankan solusi jangka panjang dan jangka pendek, seperti penambalan sementara dan pengecoran permanent.

Audiensi ini menghasilkan respons positif berupa survei lapangan dan rencana penganggaran perbaikan di titik-titik jalan yang rusak. Melalui identifikasi dan tuntutan hingga audiensi oleh FORKOM PEMERAN mendapatkan sedikit titik terang terkait solusi perbaikan kondisi jalan, dengan adanya respon dari pemerintah untuk memasukan lokasi jalan dan menganggarkan dalam rancangan perbaikan pada tahun selanjutnya.

Dampak Peran Advokasi Terhadap Perbaikan Infrastruktur Jalan

Dampak dari advokasi yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Pemuda Palaran (FORKOM PEMERAN) mencerminkan hasil nyata dari praktik gerakan sosial baru di tingkat lokal, yang menekankan partisipasi warga dan komunikasi publik. Penelitian ini menemukan tiga bentuk utama dampak advokasi:

1. Dampak fisik

Perbaikan nyata pada infrastruktur jalan, khususnya di Jalan Trikora–Ampera yang sebelumnya rusak parah dan membahayakan pengguna jalan, setelah adanya intervensi dari Dinas PUPR. Selain itu, titik-titik lain seperti Jalan Penghijauan di Kelurahan Bukuan dan jalan di Kelurahan Handil Bakti juga telah dimasukkan dalam rencana anggaran perbaikan tahun berikutnya, sebagai hasil dari audiensi FORKOM PEMERAN yang disertai data dan dokumentasi lapangan. Hal ini merupakan hasil dari rangkaian kegiatan advokasi yang dilakukan secara sistematis, termasuk dokumentasi kerusakan, publikasi melalui media sosial, penggalangan dukungan publik, hingga audiensi langsung dengan instansi teknis terkait. Keberhasilan perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan Palaran merupakan hasil dari sinergi antara masyarakat, forum komunikasi, dan pemerintah daerah. Sinergi ini mencerminkan kekuatan gerakan sosial berbasis komunitas dalam mendorong perubahan struktural melalui partisipasi aktif dan kolaborasi lintas aktor.

2. Dampak sosial

Strategi yang digunakan dalam membangun kesadaran publik dilakukan melalui media sosial, terutama Instagram. Melalui akun *@forkompemeran*, warga mengirim laporan visual terkait jalan rusak dengan fitur komentar dan pesan langsung. Media lokal seperti *@infopalaran* dan *@palaranku* turut membantu menyebarkan konten advokasi. Publikasi eksternal seperti *Adakah.id* dan *TribunKaltim.co* juga mendukung penyebaran informasi, memperluas jangkauan pesan dengan konten foto sebelum dan sesudah perbaikan jalan. Kegiatan ini menunjukkan praktik advokasi partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung maupun digital dalam pembangunan wilayah.

Meningkatnya kesadaran kolektif warga mengenai hak atas infrastruktur yang layak dan aman, disertai dengan tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kondisi jalan melalui media sosial serta keterlibatan mereka dalam berbagai aksi advokasi yang digerakkan oleh FORKOM PEMERAN. Melalui dorongan agar warga melaporkan kerusakan jalan, berpartisipasi dalam diskusi publik, dan turut mengawasi langsung proses pelaksanaan perbaikan infrastruktur, FORKOM menunjukkan bahwa pemuda dapat menjadi penggerak utama dalam pembangunan berbasis partisipasi.

3. Dampak relasional

Kontribusi advokasi FORKOM PEMERAN tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik dan peningkatan kesadaran sosial, tetapi juga menciptakan dampak relasional yang signifikan. Forum komunikasi yang dibentuk oleh FORKOM PEMERAN berfungsi sebagai media aspirasi dan ruang partisipatif bagi masyarakat untuk memberi masukan, mengevaluasi kebijakan, serta mengusulkan solusi infrastruktur. Interaksi melalui media sosial memperkuat komunikasi dua arah. Respons cepat dan transparansi hasil pertemuan dengan pemerintah membangun kepercayaan publik, sehingga hubungan warga dan pemerintah menjadi lebih dialogis dan partisipatif.

Forum komunikasi yang mempertemukan warga dengan pemangku kebijakan berperan sebagai jembatan untuk memperkecil jarak sosial dan memperkuat rasa saling percaya di antara keduanya. Terbukanya ruang dialog dan komunikasi yang lebih efektif antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah, ditandai dengan diterimanya audiensi FORKOM PEMERAN oleh pihak kecamatan dan dinas teknis terkait, serta keterlibatan organisasi secara langsung dalam proses pendampingan tim survei lapangan sebagai tindak lanjut advokasi.

Respon Masyarakat dan Pemerintah Daerah Terhadap Advokasi FORKOM PEMERAN

Respon terhadap gerakan advokasi yang dilakukan FORKOM PEMERAN mencerminkan dinamika sosial yang positif antara masyarakat dan pemerintah daerah. Keterlibatan aktif masyarakat serta keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi publik menunjukkan bahwa advokasi yang berbasis data, kolaboratif, dan partisipatif dapat menciptakan perubahan nyata. Penelitian ini menemukan bahwa baik warga maupun pemerintah kecamatan memberikan tanggapan konstruktif terhadap upaya yang dijalankan FORKOM, sebagaimana dijabarkan dalam dua subbagian berikut:

1. Respon Masyarakat Terhadap Advokasi FORKOM PEMERAN

Masyarakat memberikan dukungan luas terhadap FORKOM PEMERAN, baik melalui interaksi di media sosial maupun pernyataan langsung dalam wawancara. Hendy Nabil Aqila, warga Jalan Penghijauan, menyampaikan bahwa FORKOM telah membantu menyuarakan keluhan warga dan mengumpulkan bukti kondisi jalan yang rusak untuk disampaikan ke pihak terkait. Hal serupa juga disampaikan oleh Intan Sarafina, warga Kelurahan Handil Bakti, yang menyatakan bahwa FORKOM berhasil membawa aspirasi warga hingga masuk dalam agenda perencanaan perbaikan jalan oleh Dinas PUPR. Partisipasi aktif masyarakat ini menunjukkan bahwa FORKOM berhasil menjadi jembatan antara aspirasi warga dan kebijakan pemerintah.

2. Respon Pemerintah Daerah (Camat Palaran)

Pemerintah Kecamatan Palaran, melalui Camat Muhammad Dahlan, S.STP., M.Si., memberikan apresiasi terhadap gerakan yang dilakukan oleh FORKOM PEMERAN. Dalam wawancara, beliau menyatakan bahwa FORKOM menjadi contoh positif bagaimana pemuda bisa terlibat secara konstruktif dalam pembangunan daerah. Pendekatan advokasi yang dilakukan dinilai sistematis karena disertai data dan laporan berbasis bukti, yang mempermudah koordinasi antara pihak kecamatan dan Dinas PUPR. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai membuka ruang dialog yang sehat dan merespons aspirasi masyarakat yang disampaikan secara terstruktur.

Kesimpulan

Forum Komunikasi Pemuda Palaran (FORKOM PEMERAN) lahir sebagai respons atas ketimpangan infrastruktur ekonomi dan minimnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat di Kecamatan Palaran. Forum ini menjadi ruang partisipatif bagi warga, khususnya pemuda, untuk menyuarakan kepentingan kolektif secara damai dan terstruktur. Kehadiran FORKOM PEMERAN tidak hanya mencerminkan kegelisahan sosial, tetapi juga kebutuhan akan sarana komunikasi yang inklusif dan berorientasi pada perubahan sosial.

FORKOM PEMERAN mengadopsi strategi advokasi berbasis komunikasi partisipatif dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana utama. Melalui akun Instagram *@forkompemeran* serta dukungan dari media lokal seperti *@infopalaran* dan *@palaranku*, mereka menyebarkan informasi, menggalang dukungan, dan mendorong keterlibatan warga. Kolaborasi dengan media eksternal seperti *Adakah.id* dan *TribunKaltim.co* memperluas jangkauan pesan advokasi. Strategi ini menggabungkan ruang digital dan aksi lapangan untuk menciptakan solidaritas publik dan menekan pemerintah, khususnya instansi terkait seperti PUPR, agar segera menindaklanjuti permasalahan infrastruktur.

Hasil dari strategi tersebut terlihat dalam bentuk perbaikan fisik sejumlah ruas jalan yang sebelumnya rusak, serta meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan pengawasan pembangunan. Forum ini juga memperkuat komunikasi antara warga dan pemerintah melalui forum dialog langsung maupun digital. Masyarakat menjadi lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mendorong terciptanya hubungan yang lebih partisipatif dan demokratis antara warga dan pemerintah daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peran Forum Komunikasi Pemuda Palaran (FORKOM PEMERAN) sebagai media advokasi dalam menangani permasalahan

infrastruktur ekonomi di Kecamatan Palaran, penulis merumuskan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait agar hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dan berkelanjutan dalam pengembangan peran masyarakat, khususnya komunitas pemuda, dalam proses pembangunan. Adapun saran tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepada Forum Komunikasi Pemuda Palaran (FORKOM PEMERAN)

Dianjurkan agar FORKOM PEMERAN terus memperkuat pelaksanaan aksi lapangan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung, seperti kegiatan pelaporan kondisi infrastruktur yang rusak, aksi gotong royong perbaikan fasilitas umum, serta pelaksanaan forum warga secara berkala. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara komunitas dan warga, sekaligus mendorong kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan sekitar. Selain itu, FORKOM diharapkan dapat memperluas jangkauan jejaring advokasinya hingga ke tingkat RT dan RW di seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Palaran, guna memastikan bahwa distribusi informasi dan partisipasi masyarakat dapat merata dan menjangkau seluruh lapisan warga.

2. Kepada Masyarakat dan Komunitas Pemuda Lainnya

Masyarakat secara umum diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat dari hasil advokasi, tetapi juga turut aktif dalam menyuarakan aspirasi dan mengawal setiap proses perbaikan infrastruktur di lingkungan mereka. Keterlibatan aktif warga dalam proses pelaporan, pemantauan, dan diskusi publik akan memperkuat kontrol sosial terhadap kebijakan pembangunan. Di sisi lain, komunitas pemuda dari wilayah lain juga disarankan untuk menjadikan FORKOM PEMERAN sebagai contoh inspiratif dalam membentuk forum serupa, yang mengedepankan kolaborasi, transparansi, serta penggunaan media digital dalam menyampaikan aspirasi publik secara damai dan terstruktur.

3. Kepada Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Kecamatan Palaran

Pemerintah diharapkan dapat menunjukkan sikap yang lebih responsif terhadap berbagai inisiatif warga, khususnya gerakan yang diinisiasi oleh kelompok masyarakat sipil seperti FORKOM PEMERAN. Dalam rangka memperkuat keterlibatan warga dalam pembangunan, pemerintah disarankan untuk membangun mekanisme komunikasi yang lebih terbuka, terjadwal, dan berbasis data, sehingga setiap masukan dari masyarakat dapat ditindaklanjuti secara konkret. Pemerintah juga perlu secara aktif melibatkan kelompok masyarakat, komunitas pemuda, dan organisasi sipil lainnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur, agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

4. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian di masa mendatang diharapkan dapat mengkaji lebih dalam berbagai bentuk advokasi komunitas pemuda lainnya di wilayah berbeda, termasuk dalam aspek strategi komunikasi, efektivitas penyampaian aspirasi, serta tantangan dalam menjalin koordinasi dengan pemerintah. Selain itu, aspek internal organisasi seperti dinamika kepemimpinan, keberlanjutan gerakan, dan pola pengambilan keputusan dalam komunitas juga layak untuk menjadi fokus kajian, guna memperkaya literatur mengenai peran pemuda dalam gerakan sosial lokal dan pembangunan berbasis komunitas.

Daftar Pustaka

- Awainah, N., Sulfiana, S., Nurhaedah, N., Jamaluddin, J., & Aminullah, A. (2024). Peran Infrastruktur dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 6847–6854.
- Bappenas. (2020). *Tantangan Infrastruktur Jalan dan Dampaknya terhadap Mobilitas Masyarakat*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- BPS. (2023). *Kecamatan Palaran dalam Angka 2023*. Samarinda: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda.

- Brilyawan, A., & Santosa, M. (2021). Pengaruh Infrastruktur Sosial dan Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015–2019. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 29(1), 35–46.
- Cahyaningrum, A. I. (2020). Danda Janda: Strategi Advokasi LSM PEKKA dalam Memberdayakan Perempuan Rentan di Desa Batangan Kabupaten Bangkalan. *Jurnal PolGov*, 2(1), 109–149.
- Halimawan, T. (2020). Advokasi Komunitas dan Perubahan Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(2), 178–190.
- Kartika, R. (2023). Peran Generasi Z dalam Penguatan Literasi Pengelolaan Sampah di Kota Malang. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 14, 83–99.
- Kemenkeu. (2024). *Buku Informasi APBN 2024*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Salahuddin, S. P. (2024). Komunikasi dalam Organisasi Multikultural. *Komunikasi Sosial dan Lintas Budaya*, 2(1), 45–58.
- Sholikin, A. (2024). Prospek dan Tantangan Civil Society dan Advokasi Kebijakan di Indonesia. *Analisis*, 37(1), 1–15.
- Syofii, M. A. (2020). Koalisi Masyarakat Sipil dalam Advokasi Kebijakan Relokasi Warga Tambakrejo Kota Semarang. *Jurnal Politik Profetik*, 8(1), 112–135.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (12th ed.). New York: Pearson Education.
- Tribun Kaltim. (2024, Januari 31). Kerap Tergenang Banjir, FORKOM PEMERAN Keluhkan Jalan Trikora Palaran Samarinda yang Berlubang. Diakses dari <https://kaltim.tribunnews.com/2024/01/31/kerap-tergenang-banjir-forkom-pemeran-keluhkan-jalan-trikora-palaran-samarinda-yang-berlubang>
- Wardani, R. (2024). Perkembangan Arah NGO serta Civil Society di Indonesia: Periode 2024–2025. *Jurnal Sostech*, 4(9), 670–677. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i9.1381>
- Wiranata, I. M. A. (2022). *Pemetaan Teori-Teori Gerakan Sosial: Contoh Kasus di Berbagai Negara*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Widjajanto, A. (2017). *Transnasionalisasi Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.